

ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA

Oleh : Wesley Liano Hutasoit
Dosen Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Jakarta has been designated as the capital of the state through the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1964 On Statement of the Special Capital Region of Jakarta Raya Staying as the Capital of the Republic of Indonesia By the name of Jakarta, it is also the center of government and the business center that transforms it has the appeal for the population to Live and earn a living in the capital.

Indonesia moved the capital to Yogyakarta from January 1946 to December 1949 because of the war of independence. From Bukittinggi in West Sumatra it was also a capital city when President Sukarno formed an emergency government before he was captured by the Dutch between December 1948 and June 1949. Bireuen in Aceh Province had also been the capital of the country for only a week, and after that the capital returned to Jakarta awaits independence through the Proclamation of Independence of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The move of the nation's capitals takes place in several countries and some countries have success stories in their efforts to move the old capital to new places, such as Kuala Lumpur to Putrajaya in Malaysia, Bonn to Berlin in Germany, Melbourne to Canberra in Australia, Valladolid to Madrid in Spain, or Kyoto to Tokyo in Japan. Successful capital relocation can occur in both developed and developing countries. Dubai is known worldwide as a key business city but Abu Dhabi is the capital of the United Arab Emirates. In India, Mumbai is the business capital, while New Delhi is the seat of government.

Common reasons for the transfer of the capital are socio-economic considerations, political considerations, and geographical considerations. Indonesia considers all three factors in the analysis to move its capital, not only in-country analysis, but also an analysis of the experiences of other countries in the world that have moved their capital. The experience of the various countries that have moved their capital will provide input and consideration that would otherwise be used as a more appropriate analytical tool to examine problems in Indonesia.

Keyword : Capital City, Jakarta, Palangkaraya

ABSTRAK

Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.

Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta dari Januari 1946 sampai Desember 1949 karena perang kemerdekaan. Dari Bukittinggi di Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saat Presiden Sukarno membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangkap oleh Belanda antara Desember 1948 dan Juni 1949. Bireuen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu lamanya, dan setelah itu ibu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi di beberapa negara dan beberapa negara memiliki kisah sukses dalam upaya mereka memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat baru, seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang. Keberhasilan relokasi ibu kota dapat terjadi di negara maju maupun berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebagai kota bisnis utama tetapi Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di India, Mumbai adalah ibu kota bisnis, sementara New Delhi sebagai pusat pemerintahan.

Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisis di dalam negeri, namun juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang sudah memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan dan pertimbangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mengkaji masalah di Indonesia.

Kata Kunci : Ibu Kota, Jakarta, Palangkaraya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta, Daya Tarik Ibu Kota

Ibu kota negara atau *capital city* atau *political capital*, berasal dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head*), dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.

Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat negara dan pusat pemerintahan yang dilindungi dalam Undang-Undang. Jakarta sebagai ibu kota tentunya membedakan semua daerah meskipun memiliki kewenangan yang sama sebagai sebuah provinsi, tentunya Kota Jakarta sebagai ibu kota mempunyai status istimewa sebagai ibukota, memiliki peranan penting mempengaruhi kekuasaan politik, ekonomi, pembangunan dan hal penting lainnya kepada setiap provinsi yang ada.

Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.

B. Rumusan Masalah

Tulisan dalam jurnal ini membahas bagaimana keadaan suatu negara ketika terjadinya pemindahan ibu kota, adapun sejarah negara-negara lain yang sudah melakukan pemindahan ibu kota negara menjadi pengetahuan penting sebagai pembelajaran dan menarik pengalaman akan penting dan besarnya pengaruh pemindahan ibu kota negara.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai wacana pemindahan ibu kota negara yang setiap tahun selalu diperbincangkan. Penelitian ini menekankan pada metode yang bersifat deskriptif analisis yang mencari informasi tentang pemindahan ibu kota negara, perbandingan juga dilakukan dengan negara-negara lain yang berhasil dan gagal melakukan pemindahan ibu kota negara, kesemuanya di analisa secara deskriptif dalam jurnal penelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara, adalah:

1. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca terkhususnya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Menambah pengetahuan mengenai pemindahan negara, bahwa tidak selalu pemindahan ibu kota negara mengalami kegagalan. Dari penelitian ini kita mendapatkan pemahaman bagaimana perjalanan pemindahan ibu kota negara.
3. Menambah literatur untuk pengembangan penelitian lebih lanjut agar dapat lebih disempurnakan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan (pasal 5). Hal ini bermakna bahwa Jakarta sebagai ibukota NKRI bukan hanya berarti memiliki hak dan kewenangan khusus saja tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab. Karena kekhususannya tadi, maka terdapat kewajiban Pemprov DKI kepada Presiden RI (pasal 26 ayat 7). Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya ke Presiden RI itu meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pakar perencanaan kawasan urban, Yeremias T. Keban, berpendapat sebenarnya persoalan kompleks yang membelit Jakarta bisa diselesaikan tanpa harus memindah lokasi ibu kota. Solusinya, hanya perlu dengan memperbaiki infrastruktur penyebab persoalan semacam banjir, kemacetan, kepadatan bangunan atau penduduk, dan banyak masalah lain.

Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi di beberapa negara dan beberapa negara memiliki kisah sukses dalam upaya mereka memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat baru, seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang.

Keberhasilan relokasi ibu kota dapat terjadi di negara maju maupun berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebagai kota bisnis utama tetapi Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di India, Mumbai adalah ibu kota bisnis, sementara New Delhi sebagai pusat pemerintahan.

Sejumlah negara memindahkan ibu kotanya lebih dari sekali seperti Kanada yang berpindah-pindah sebanyak empat kali dari Monteval-Toronto-Quebec kemudian ke Ottawa. Iran bahkan pernah memindahkan ibu kotanya lebih dari 10 kali sebelum akhirnya sekarang memilih Teheran.

Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta dari Januari 1946 sampai Desember 1949 karena perang kemerdekaan. Dari Bukittinggi di Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saat Presiden Sukarno membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangkap oleh Belanda antara Desember 1948 dan Juni 1949. Bireuen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu lamanya, dan setelah itu ibu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pakar demografi sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan posisi ibu kota negara di Jakarta tidak perlu dipindah meskipun tingkat kepadatannya semakin tinggi. Alasan dia, pemindahan ibu kota ke luar Jakarta berarti sama saja dengan memobilisasikan tiga juta orang ke daerah lain sehingga akan menghabiskan biaya sangat besar. Jumlah pegawai semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat mencapai angka jutaan, belum ditambah dengan anggota keluarga. salah satu solusi untuk menyasati kepadatan Jakarta, tanpa harus memindahkan ibu kota, ialah dengan menyebar kantor kementerian ke semua provinsi. Maka, sumber daya manusia di setiap kementerian, sekaligus anggaran kelembagaannya, akan terdistribusi ke banyak daerah dan kementerian akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di banyak provinsi, disampaikan pada acara seminar “Apakah Ibukota Jakarta Perlu Dipindah?” di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM pada Kamis, 20 Agustus 2015.

III. PEMBAHASAN

A. Jakarta Sebagai Ibu Kota

Jakarta sebagai ibu kota tentunya memiliki permasalahan seperti provinsi pada kota lainnya, tetapi Jakarta memiliki nilai lebih karena dikarenakan sebagai Ibu Kota Negara. Pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan dengan pulau lainnya memang tidak seimbang, pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi dari pada di pulau lainnya di Indonesia (Kepala Bappenas, pada Kompas.com 3/7).

Tanpa memecah konsentrasi kegiatan nasional ke luar Jakarta, infrastruktur (transportasi) yang dibangun di DKI Jakarta sepertinya sulit untuk dapat mengurai keruwetan transportasi di ibu kota, karena jumlah kendaraan akan terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk.

Argumen lain mengenai pentingnya pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan adalah lingkungan Kota Jakarta sulit karena sudah terlalu padat, penuh gedung permanen, dan minim cadangan sumber air baku. Juga, distribusi penduduk yang 60% bertumpu di Jawa sebagai pusat kekuasaan hanya mungkin dapat terdistribusi ke luar Jawa bila ada perubahan dengan lahirnya wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

Berdasarkan data bahwa 70% ekonomi nasional digerakkan oleh dana APBN, dan dana APBN itu akan selalu berputar di sekitar pusat kekuasaan. Bila pusat kekuasaan di Jakarta, maka perputaran dana APBN juga hanya di Jakarta dan sekitarnya. Apakah perputaran nilai ekonomi dan pembangunan dipengaruhi karena Jakarta sebagai Ibu Kota atau Kota Jakarta memang sebagai kota pusat bisnis tanpa kehadiran Ibu Kota didalamnya?

Fakta ketimpangan kepadatan dan pembangunan antara wilayah Indonesia barat dan timur selama ini sulit diatasi sejak era kolonial. Apalagi, kawasan padat seperti Jakarta malah menjadi pusat perputaran 70 persen dari uang yang beredar di Indonesia. Indonesia barat luasnya 22 persen wilayah nasional, tapi ditempati 78 persen penduduk, di Jawa saja ditempati 57 persen penduduk.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia timur yang memiliki luas 72 persen dari wilayah nasional dan hanya ditempati 20 persen penduduk. Di kawasan seperti Papua, angka kepadatannya sembilan jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Jakarta, kepadatannya mencapai 15.015 jiwa per kilometer persegi. Situasi ketimpangan kepadatan ini memicu pemusatan investasi ekonomi di beberapa kawasan saja sehingga tingkat kemiskinan Jakarta sangat rendah dibanding daerah lain, yakni 3,7 persen. "Rata-rata tingkat kemiskinan kota Indonesia, 8,5 persen dan desa 14,4 persen.

Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternyata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pertumbuhan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besaran. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta, meskipun Proyek Banjir Kanal Timur telah dioperasikan.

Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa, tampak pula dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang

ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya.

Kini, ketika Jakarta terbukti tidak mampu lagi mengendalikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran peruntukan ruang, tidak mampu mengendalikan penduduk dan permukiman yang ditandai dengan ketidakmampuan menyediakan hunian yang layak bagi warga Jakarta, terutama golongan berpendapatan rendah dan miskin dan berbagai keperluannya, serta gagal dalam menata transportasi umum yang layak dan terjangkau dan mampu menghindari kemacetan, ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta ini tentu harus dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutnya, perlu dikaji dan direncanakan kota pengganti yang dibangun secara visioner untuk mampu mengemban peran dan tanggungjawab sebagai ibukota NKRI hingga ratusan tahun ke depan.

B. Kota Palangkaraya Sebagai Wacana Tujuan Ibu Kota Negara

Indonesia sangat memerlukan pembangunan growth pole lain di luar Pulau Jawa guna menetralisasi potensi gaya sentrifugal Jawa yang membuat ekonomi jangka panjang tidak efisien dan makin tidak berkualitas. Saat ini, 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa. Sementara, sebagian besar bahan penghasil energi listrik dan energi panas bagi industri-industri tersebut didatangkan dari luar Pulau Jawa.

Pada saat yang sama, konsentrasi industri di Jawa itu juga terus menyusutkan lahan-lahan pertanian di Jawa yang merupakan lahan pertanian paling subur di Indonesia. Pihak Badan Pusat Statistik melaporkan (tanggal 1 Juli 2010) bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian di Jawa seluas 27 juta hektar. Dari kondisi ini saja, telah terjadi sejumlah langkah-langkah paradoks dalam pembangunan yang dicanangkan, seperti membangun ketahanan pangan, pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan hemat energi, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan sebagainya.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, meskipun akan memakan biaya sekitar Rp Rp 50 hingga Rp 100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (visi Indonesia 2033:2010), dengan rata-rata Rp 10 Triliun pertahun. Biaya tersebut merupakan investasi bangsa yang akan menghasilkan keuntungan berlipat-lipat dalam jangka panjang, untuk masa depan NKRI sepanjang usianya. Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi

negara melalui aliran masuk investasi maupun wisatawan. Sejauh kita bisa mendorong persebaran kedatangan pemodal dan wisatawan asing itu ke berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan devisa itu tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pengeluaran Rp 100 triliun untuk waktu sepuluh tahun, atau kurang dari 1% nilai APBN, jelas jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang sekarang mencapai di atas Rp 20 triliun per tahun, dan degradasi lingkungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila kerugian akibat kemacetan tersebut digabungkan lagi dengan kerugian akibat banjir, kemerosotan daya dukung lingkungan, kemerosotan kualitas hubungan sosial, dan sebagainya dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, investasi memindahkan ibu kota menjadi jauh lebih besar lagi manfaatnya.

Dari total investasi untuk infrastruktur dan sarana yang dibangun di Ibu Kota baru ini tentu sebagian akan berfungsi juga sebagai penjual jasa-jasa pemerintahan kepada publik. Infrastruktur dan sarana itu misalnya adalah jaringan listrik, instalasi air bersih, bandara, pelabuhan dan beberapa lainnya. Artinya, untuk jenis infrastruktur dan sarana tertentu, dalam jangka panjang investasi yang dikeluarkan bisa dikembalikan dari pembayaran yang dikenakan kepada pengguna jasa.

Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan akan memberikan energi untuk memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan mendukung misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pembangunan berkelanjutan. Dengan 2/3 luas wilayah yang terdiri dari lautan, selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia justru berbasis daratan. Implikasinya, potensi ekonomi kemaritiman menjadi lenyap. Perekonomian maritim dalam wujud industri perkapalan, pengolahan ikan, pariwisata laut, energi air, transportasi air, dan lain-lain tidak berkembang. Problem ekonomi biaya tinggi di Indonesia selama ini antara lain disebabkan tingginya ongkos logistik yang bersumber dari inefisiensi transportasi laut (kapal). Demikian pula, masih belum maksimalnya ekspor Indonesia karena sangat tergantung dari komoditas darat (perkebunan dan lain-lain). Seluruh problem itu akan dapat diurai jika perekonomian kita bergerak menuju pemanfaatan potensi maritim. Penempatan ibu kota di Kalimantan bagian selatan agak ke timur sangat tepat sebagai episentrum pengembangan ekonomi maritim nasional yang akan menggerakkan potensi ekonomi maritim di kawasan timur maupun barat Indonesia.

Pemindahan Ibukota NKRI yang diiringi oleh pengembangan kota baru sebagai fungsi ibukota merupakan peluang membangun salah satu model Kota Lestari. Membangun Kota Lestari tentunya tidak dapat diserahkan semata kepada sektor swasta yang berorientasi keuntungan. Kota Lestari mengandung misi-misi permukiman berkelanjutan yang hanya dapat

dijalankan dengan kepemimpinan sektor publik yang kuat dan didukung sektor swasta dan masyarakat secara sinergis.

Sebagai model Kota Lestari di tanah air, ibukota baru adalah simbol Indonesia Baru dengan segala kebaikan pembangunan kota dan penataan permukimannya. Ibukota baru direncanakan menampung kepadatan penduduk yang terencana hingga berjumlah lebih kurang 1 juta penduduk saja. Ibukota baru sebagai model kota lestari adalah ajang diterapkannya berbagai pendekatan pengembangan permukiman dan kota yang belum berhasil diwujudkan hingga kini, seperti:

1. Penataan ibukota pusat pemerintahan atau civic center yang terpadu dengan fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara);
2. Manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007);
3. Pengembangan sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (Transit Oriented Development);
4. Pengembangan integrated urban infrastructure management;
5. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999);
6. Pembangunan kota terpadu dengan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman;
7. Pengembangan permukiman berbasis komunitas (community housing);
8. Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga sustainable settlements;
9. Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (capacity building and institutional development) pengelolaan Ibukota NKRI.

Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus diletakkan dalam agenda membangun multigrowth pole nasional yang selanjutnya diiringi oleh agenda membangun multigrowth pole perwilayah. Ibu kota yang baru - karena posisi dan lokasinya- akan berada dalam jaringan kota-kota nasional yang sehat, seimbang, saling memperkuat dan membentuk tatanan kewilayahan yang harmonis. Dengan bentuk jaringan baru kota-kota nasional, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena tiap jenis industri berada relatif di dekat sumber bahan energi dan bahan baku yang dibutuhkan. Kota-kota besar serta kota-kota industri di

Jawa juga terhindar dari kongesti bongkar muat pelabuhan laut, kongesti traffic penerbangan, dan kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Usulan pemindahan ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. Pertama, Kalimantan, tepatnya Kalimantan bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

Dengan porsi jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya terhadap nasional. Tetapi, yang lebih menyedihkan adalah, porsi investasi di Kalimantan terhadap total investasi nasional yang hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke Jawa.

Alternatif pemindahan ibukota ke Jonggol atau Sentul -seperti yang selama ini banyak dimunculkan- hanyalah ide menggeser ibukota semata dan tidak didasari agenda pemerataan pembangunan wilayah dan kota-kota. Untuk mengurangi laju migrasi penduduk dari daerah lain ke Jabodetabek, ide ini justru mengandung kontradiksi dengan tujuan manajemen kependudukan selama ini, karena ia akan terus merangsang orang untuk datang dari berbagai daerah dan memberikan tekanan pada Jakarta untuk semakin membesar menuju megaurban yang berkembang secara menjalar (urban sprawl) dan berserakan (scattered). Di luar hal tersebut, ide pemindahan Ibu Kota ke Sentul atau Jonggol tidak menjawab persoalan-persoalan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan.

Pilihan Presiden Soekarno ke Palangka Raya sebagai calon ibu kota baru juga didasarkan pada alasan geografis. Alasan Bung Karno memindahkan ibu kota RI ke kota tersebut ialah karena Palangkaraya berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga baik dari Sumatra, Sulawesi, Bali,

NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, maupun Papua merasakan jaraknya sama. Dapat terjangkau lebih mudah dari semua pulau di nusantara. Selain itu, daerah ini juga diperkirakan lebih aman dari bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi. Karakter ini berbeda dari Jakarta yang berada tak jauh dari titik patahan gempa. Apalagi luas wilayah Palangkaraya, yakni 2.678 Kilometer persegi, hampir empat kali lipat lebih lebar dari wilayah DKI Jakarta dengan luas 661,52 Kilometer persegi.

Mengingat Palangkaraya terletak di atas salah satu lapisan gambut ombrogen terbesar di kawasan tropis Asia Tenggara, Bung Karno memanggil insinyur-insinyur Rusia untuk memimpin pembangunan jalan Palangkaraya-Tangkiling. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama jalan Rusia dan kini berubah namanya menjadi Jalan Tjilik Riwut. Pembangunan jalan ini bagian dari pembangunan kota baru Palangkaraya yang diresmikan Presiden Sukarno, pada 17 Juli 1957.

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran pernah mengungkapkan Provinsi Kalimantan Tengah yang sering disebut "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" siap menyediakan lahan seluas 500.000 hektare untuk pembangunan Ibu Kota negara baru. Lahan itu tersebar di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Adanya keinginan dalam wacana bahwa pindahnya kantor presiden dan kementerian/lembaga dari Jakarta ke kota lain seperti Kota Palangka Raya tentu akan membawa perubahan signifikan terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekaligus berdampak luas untuk pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya maupun Pulau Kalimantan pada umumnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan awal bulan ini mengatakan tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di 3 provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak justru berkeras menawarkan provinsinya sebagai ibu kota negara kepada Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung, termasuk ketersediaan lahan, letak geopolitik dan geostrategis, serta masyarakatnya yang heterogen.

C. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam Visi Indonesia 2033 tahun 2010, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah

tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migran baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, serta menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di Jawa dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk nasional.

Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisis di dalam negeri, namun juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang sudah memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan dan pertimbangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mengkaji masalah di Indonesia.

Wacana pemindahan Ibu Kota ada sejak Pemerintahan Soekarno, Orde Lama, bahkan telah mendatangkan ahli perencana kota dari Rusia untuk mendesain Kota Palangka Raya sebagai calon Ibu Kota RI. Kondisi tersebut melatarbelakangi tata bangunan Kota Palangkaraya tampak rapi, jalan dominan lurus, rumah-rumah di tepi jalan dibuat masuk ke dalam, sehingga bila sewaktu-waktu jalan dilebarkan, pemerintah tidak perlu menggusur warga, apalagi lahan yang tersedia masih mencukupi.

Pemindahan ibu kota negara terjadi pada beberapa pemerintah, yaitu:

1. Masa Presiden Soekarno.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya muncul pertama kali pada 1950-an. Saat meresmikan pembangunan Kota Palangka Raya pada Tahun 1957, Presiden Soekarno mewacanakan rencana pemindahan lokasi ibu kota ke daerah tersebut. Palangkaraya adalah kota baru yang dibangun dengan membuka hutan di pinggir sungai Kahayan, Kalimantan Tengah.

2. Masa Presiden Soeharto

Pada masa Orde Baru, Wacana pemindahan Ibu Kota RI seakan hilang karena lebih memfokuskan pembangunan di Jawa dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan maupun bisnis. Konsekuensinya, Jakarta menjadi pusat urbanisasi nasional. Palangkaraya bukan satu-satunya alternatif lokasi ibu kota yang pernah dikaji oleh pemerintah Indonesia.

Semasa Orde Baru, Presiden Soeharto juga mewacanakan pemindahan lokasi Ibu Kota ke Jonggol melalui Keppres 1 Tahun 1997

Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Rencana pemindahan ibukota, Joogol berada di Kota Bogor yang berjarak 60 Kilometer dari Jakarta. Joggol memiliki lahan kosong seluas 30.000 Hektar yang siap dijadikan tujuan pembangunan Ibu Kota negara.

3. Masa Presiden BJ Habibie

Pasca reformasi, Presiden BJ Habibie juga pernah mewacanakan kemungkinan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Alasan Habibie, daerah ini juga bisa dianggap berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

4. Masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya di tahun 2010, wacana pemindahan ibu kota itu muncul kembali, tapi hanya sesaat dan kemudian tenggelam lagi. Pemindahan ibu kota diwacanakan akan pindah ke Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah.

5. Masa Presiden Joko Widodo

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya melebihi usaha mewujudkan gagasan lama Presiden Soekarno untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Palangka Raya. Bukan sekadar alasan politis tapi sudah saatnya keruwetan Kota Jakarta saat ini, terutama menyangkut transportasi dan lingkungan hidupnya, hanya bisa diurai dengan memecah konsentrasi kegiatan nasional ke luar Jakarta, terutama luar Jawa.

Pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan. Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai.

Wacana untuk memindahkan Ibu kota Negara dari DKI Jakarta akan di realisasikan mulai tahun 2018, kajian pemindahan ibu kota termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. Kemudian pada tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan, sesuai pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, (*kompas.com*, 3/7).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Soemantri Brodjonegoro, usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang, pada Jumat, April 2017. Salah satu alasan pemerintah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota ialah karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru. Pulau

Jawa terlalu mendominasi perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian belum menyebar ke seluruh Jawa melainkan baru terkonsentrasi di kawasan Jabotabek atau DKI Jakarta dan sekitarnya sehingga perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa.

Bambang Brodjonegoro, mengatakan salah satu cara efektif untuk mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa ialah dengan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke pulau lain. Presiden Joko Widodo meminta Bappenas menggelar kajian pemindahan Ibu Kota negara dengan maksud mendorong diversifikasi pusat pertumbuhan. Bila rencana ini benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, bisa dikurangi.

Bambang mengimbuahkan kajian Bappenas terhadap rencana pemindahan Ibu Kota negara masih memerlukan proses panjang. Pemindahan Ibu Kota Negara harus benar-benar memperhatikan rasionalitas ekonomi dan kecukupan anggaran dan mengkaji skema pembangunan ibu kota baru yang tidak memberatkan APBN.

Johan Budi Spto Prabowo, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, mengatakan wacana mengenai pemindahan Ibu Kota ke wilayah lain di luar Jawa, yakni Kota Palangkaraya, kini mulai dikaji Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bhima Yudhistira Adhinegara, Pengamat Ekonomi, menilai, pemindahan ibu kota misalnya ke Kalimantan, bisa menciptakan pusat ekonomi baru di Indonesia. Selain munculnya magnet baru ekonomi, pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorong pembangun infrastruktur di wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya transportasi (kompas.com, 3/7).

Di Amerika Serikat, Washington DC hanyalah pusat pemerintahan, sedangkan pelbagai distrik bisnis tersebar di berbagai negara bagian lainnya. Kantor pusat *CNN* terletak di pusat kota Atlanta, *New York Times* di New York City, Hollywood di Los Angeles, industri mobil di Detroit, universitas-universitas besar di Cambridge dan Boston, bahkan pusat perjudian di Las Vegas.

Ada beberapa pilihan mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Negara, diantaranya:

1. Pindahnya Ibu Kota ke kota lainnya, maka Kantor Presiden dan Kantor Pemerintahan kementerian/lembaga (K/L) juga akan berpindah ke kota yang baru di tuju. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
2. Pemindahan pusat pemerintahan saja, sedangkan Ibu Kota Negara tetap Jakarta, maka proses politiknya lebih sederhana dan masih menjadi

domain pemerintah, DPR cukup mengetahui saja. Contoh kasus Malaysia; ibu kotanya masih tetap Kuala Lumpur, namun pusat pemerintahan dipindahkan ke Putra Jaya.

Pertanyaan yang diperlukan untuk diurai adalah pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan? Ini dua hal yang berbeda. Jika pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain di luar Jawa, tentu prosesnya lebih panjang karena memerlukan persetujuan DPR.

Agenda pemindahan ibukota tentunya bukan semata didasarkan pada pertimbangan ancaman terhadap dan ketidaklayakan Jakarta, melainkan didasarkan pada visi ke depan tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional. Oleh karena tujuan pemindahan Ibu Kota itu bukan bersifat tunggal, maka ia harus berisi beberapa rencana tindakan strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan merupakan masing-masing dinamika yang terpisah. Pemindahan Ibu Kota adalah juga strategi untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan merata serta menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Perlu kiranya disadari, dengan episentrum yang mahakuat di Jakarta saat ini, ditambah porsi 80% industri yang berlokasi di Jawa, maka program transmigrasi penduduk keluar Jawa, percepatan pembangunan daerah tertinggal di luar Jawa, pengembangan pendidikan di luar Jawa, dan sebagainya, tidak akan bisa efektif dan optimal karena kuatnya daya tarik dari episentrum Kota Jakarta dan Pulau Jawa untuk menarik kembali berbagai sumber daya yang ada di luar Jawa, termasuk yang dialokasikan lewat berbagai kebijakan tadi.

Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, dalam jangka menengah dan jangka panjang, hal ini dapat memecahkan dua karakteristik masalah kemiskinan sekaligus, yaitu karakteristik kemiskinan di Jawa dan luar Jawa. Kemiskinan di Jawa memiliki karakteristik kemiskinan Asia, yang disebabkan penduduk yang terlampau banyak dan padat. Sementara itu, kemiskinan di Indonesia bagian tengah dan timur berkarakter kemiskinan Afrika yaitu kemiskinan karena minimnya infrastruktur dan ditandai dengan penduduk yang jarang. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia bagian tengah dan timur dapat menciptakan stimulasi untuk mengatasi persoalan ini dengan menciptakan keseimbangan baru secara bertahap.

Agenda pemindahan ibu kota itu tentu saja harus diiringi oleh beberapa tindakan strategis pendukung lainnya di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang

kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan gerakan yang masing-masing otonom. Pindahan ibu kota adalah jalan untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya.

Agenda pindahan ibu kota ke Kalimantan adalah agenda kunci untuk menata Indonesia, sejauh ia diiringi dengan agenda-agenda strategis lainnya, yang di dalamnya termasuk agenda menata Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pindahan ibu kota ke Kalimantan adalah jalan untuk menata perekonomian nasional agar betul-betul bisa meraih pertumbuhan yang berkualitas, karena memperbesar peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan manusia secara efisien.

Dalam konteks upaya nation building, pindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan menghasilkan tonggak nasionalisme baru Indonesia, karena penempatan Ibu Kota di titik tengah nusantara itu bisa menjadi simbol kebersamaan antara berbagai bagian Indonesia, simbol untuk berbagi, yang akan mendorong semua warga negara merasa lebih memiliki Indonesia. Kalimantan di sekitar bagian selatan agak ke timur, adalah titik tengah nusantara diantara rentang Sabang-Merauke dan rentang Miangas dan Pulau Rote.

Dalam pengertian geografis, kota adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah berkelompok, dan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. Terdapat dikotomi bentuk perkotaan yang didasarkan pada bentuk geometri kota yaitu *planned* dan *lanne* (Kostof dalam Ardian:2007), yaitu:

- a. Bentuk *Planned* (terencana). Dapat dijumpai pada kota-kota Eropa abad pertengahan dengan pengaturan kota yang selalu regular dan rancangan bentuk geometrik.
- b. Bentuk *Unplanned* (tidak terencana). Banyak terjadi pada kota-kota metropolitan, dimana satu segmen kota berkembang secara spontan dengan bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi, sehingga akhirnya kota akan memiliki bentuk semanya yang kemudian disebut dengan *organic pattern*, bentuk kota organik tersebut secara spontan, tidak terencana dan memiliki pola yang tidak teratur dan non-geometrik.

Hall (2006) membagi kota dalam tujuh tipe, yaitu:

1. *Multi-Function Capitals*. Mengkombinasikan semua atau sebagian besar fungsi tertinggi dari fungsi pemerintahan di level nasional (London, Paris, Madrid, Stockholm, Moscow, Tokyo).
2. *Global Capitals*. Kondisi spesial dari tipe pertama dimana ibukota juga memiliki peran di tingkat super-nasional dalam politik, komersial

- (ekonomi), keduanya (London, Tokyo).
3. *Political Capitals*. Memiliki fungsi sebagai kota pusat pemerintahan, tetapi memiliki peran sebagai kota pusat ekonomi (The Hague, Bonn, Washington, Ottawa, Canberra, Brasília).
 4. *Former Capitals*. Kota yang pernah menjadi ibukota (tidak lagi memiliki status sebagai ibukota) tetapi tetap memertahankan fungsi historisnya (St. Petersburg, Philadelphia, Rio de Janeiro).
 5. *Imperial Capitals*. Kondisi spesial dari tipe ketiga, dimana kota merupakan mantan ibukota dimasa kerajaan yang kembali menjadi ibukota dimasa modern. Kota tersebut juga memiliki fungsi penting dalam kegiatan ekonomi dan budaya untuk wilayah mantan kerajaannya (London, Madrid, Lisbon, Vienna).
 6. *Provincial Capitals*. Kondisi spesial dalam negara federal. Mirip seperti tipe ketiga, sebuah kota pernah memiliki status sebagai ibukota secara *de facto*, namun di era modern telah kehilangan statusnya. Perubahan status tersebut memengaruhi fungsi mereka terhadap daerah di sekelilingnya (Milan, Turin, Stuttgart, Munich, Montréal, Toronto, Sydney, Melbourne).
 7. *Super Capitals*. Kota yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat dari organisasi internasional. Kota ini hanyalah kota biasa ataupun kota yang memiliki status sebagai sebuah ibukota (Brussels, Strasbourg, Geneva, Rome, New York).

Menurut penjelasan Campbell, Indonesia berada pa tahapan *Archipelago Capital* dalam perkembangan kota. Campbell (2004) merangkum berbagai macam tipe dan membaginya kedalam enam kategori utama. Campbell merangkum mempertimbangkan aspek historis yang ada dalam kota tersebut, adalah:

1. *Classic Capitals*: Jakarta, Bogota, Caracas, London, Madrid, Mexico City).
2. *Relocated Capitals*: Ankara (dari Istanbul 1923, Turki), Astana (dari Almaty 1998, Kazakhstan), Lilongwe (dari Blantyre 1976, Malawi).
3. *Constructed Capitals*: Abuja (dari Lagos 1991, Nigeria), Brasilia (dari Rio Janeiro 1960, Brasil), Canberra (dari Melbourne 1927, Australia), Islamabad (dari Karachi 1960, Pakistan).
4. *Federal Capitals*: Canberra (Australia), Kinshasa (Kongo), Moscow (Rusia), Ottawa (Kanada).
5. *Capitals*: Amsterdam/ The Hague (Belanda), Bloemfontein/ Cape Town (Afrika Selatan).
6. *Archipelago Capitals*: Jakarta (di pulau Jawa, Indonesia), Tokyo (di pulau Honshu, Jepang).
7. *Capitals with Unique Jurisdictions*: Abuja (*Federal Capital Territory*,

Nigeria Brasilia (*Federal District*, Brasil), Mexico City (*Federal District*, Meksiko).

Perbandingan Geografi Kota Jakarta dan Kota Palangkaraya

Tabel 1. Tabel Geografi Kota Jakarta

The Total Area and Number of Administrative Units by Regency/Municipality, 2009-2013							
<i>Regency/Municipality</i>	Area (km ²)						
	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Kep. Seribu	8.7	8.7	8.7	8.7	8,70		
Jakarta Selatan	141.27	141.27	141.27	141.27	141,27		
Jakarta Timur	188.03	188.03	188.03	188.03	188,03		
Jakarta Pusat	48.13	48.13	48.13	48.13	48,13		
Jakarta Barat	129.54	129.54	129.54	129.54	129,54		
Jakarta Utara	146.66	146.66	146.66	146.66	146,66		
DKI Jakarta	662.33	662.33	662.33	662.33	662,33		
Sumber : BPS Kota Jakarta							

Tabel 2. Tabel Geografi Kota Palangkaraya

Luas Wilayah Kota Palangka Raya, 2014		
Kecamatan	Luas (Km²)	%
Pahandut	117.25	4.4
Sabangau	583.5	21.8
Jekan Raya	352.62	13.2
Bukit Batu	572	21.3
Rakumpit	1053.14	39.3
Palangka Raya	2 678.51	100.0
<i>Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya</i>		

IV. PENUTUP

1. Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota. Dalam UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta dari Januari 1946 sampai Desember 1949 karena perang kemerdekaan. Dari Bukittinggi di Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saat Presiden Sukarno membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangkap oleh Belanda antara Desember 1948 dan Juni 1949. Bireuen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu lamanya, dan setelah itu ibu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Adanya wacana pemindahan ibu kota negara yang setiap tahun selalu diperbincangkan, jurnal ini membahas bagaimana keadaan suatu negara ketika terjadinya pemindahan ibu kota, adapun sejarah negara-negara lain yang sudah melakukan pemindahan ibu kota negara menjadi pengetahuan penting sebagai pembelajaran dan menarik pengalaman akan penting dan besarnya pengaruh pemindahan ibu kota negara.
4. Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi di beberapa negara dan beberapa negara memiliki kisah sukses dalam upaya mereka memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat baru, seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang.
5. Keberhasilan relokasi ibu kota dapat terjadi di negara maju maupun berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebagai kota bisnis utama tetapi Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di India, Mumbai adalah ibu kota bisnis, sementara New Delhi sebagai pusat pemerintahan.
6. Sejumlah negara memindahkan ibu kotanya lebih dari sekali seperti Kanada yang berpindah-pindah sebanyak empat kali dari Montreal-Toronto-Quebec kemudian ke Ottawa. Iran bahkan pernah memindahkan ibu kotanya lebih dari 10 kali sebelum akhirnya sekarang memilih Teheran.

7. Pakar perencanaan kawasan urban, Yeremias T. Keban, berpendapat sebenarnya persoalan kompleks yang membelit Jakarta bisa diselesaikan tanpa harus memindah lokasi ibu kota. Solusinya, hanya perlu dengan memperbaiki infrastruktur penyebab persoalan semacam banjir, kemacetan, kepadatan bangunan atau penduduk, dan banyak masalah lain.
8. Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternyata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besaran. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bps.go.id/>

<https://geotimes.co.id/tiga-provinsi-ini-dikaji-sebagai-calon-ibukota/>
(Sumber : Kantor Berita Antara yg dimuat ulang)

<https://geotimes.co.id/saatnya-jokowi-memindahkan-ibu-kota/>

<http://www.theindonesianinstitute.com/perlukah-pemindahan-ibukota-negara/>

<https://tirto.id/bappenas-ibu-kota-dipindah-untuk-bentuk-pusat-ekonomi-baru-cmkh>

<https://tirto.id/q/pemindahan-ibu-kota-hto/2>

<https://tirto.id/topik/wacana-pemindahan-ibu-kota-58e787b19d3f268570d35bfa>

<https://tirto.id/bappenas-kaji-gagasan-pemindahan-ibu-kota-ke-palangkaraya-cmj4>

<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/21/058693774/jakarta-padat-tapi-ibu-kota-sulit-dipindah-solusinya>

http://www.visi2033.or.id/news_8.htm